

Bupati-wali kota:

📅 Opsi 1:
10 Februari (tanpa sengketa MK)

📅 Opsi 2:
21 April (setelah sengketa MK)

📅 Opsi 3:
24 Maret (dismissal MK)

Diputuskan:

📅 Semua kepala daerah tanpa
sengketa MK dilantik 6 Februari
2025.

**3 Opsi Pelantikan
Kepala Daerah
dari Mendagri:**

Gubernur/wagub:

📅 Opsi 1:
6 Februari (tanpa sengketa MK)

📅 Opsi 2:
17 April (setelah sengketa MK)

📅 Opsi 3:
20 Maret (dismissal MK)

PELANTIKAN KEPALA DAERAH TAK SERENTAK

Tanpa Sengketa di 6 Februari, Sisanya Tunggu Putusan MK

Sebanyak 545 pasangan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akhirnya tak jadi dilantik serentak. Akan ada beberapa gelombang pelantikan. Sekitar 270 kepala daerah yang tidak ada sengketa akan diambil sumpahnya pada 6 Februari 2025. Gelombang kedua dilakukan bagi mereka yang ada gugatan dan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak atau dismissal. Sementara kloter terakhir bagi kepala daerah yang gugatannya diterima untuk kemudian diperintahkan pilkada ulang atau pemungutan suara ulang. Untuk gelombang 2 dan 3, pemerintah belum bisa memperkirakan kapan pelaksanaannya. Sejarah baru juga akan terjadi saat pelantikan, karena Presiden RI, Prabowo Subianto bakal melantik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak tiap gelombangnya. Kesepakatan pelantikan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 164b UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Terkait lokasi pelantikan, acara bakal digelar di Jakarta. Sebab, Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota dan belum ada keputusan presiden untuk memindahkan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah pun didesak agar segera melakukan revisi Peraturan Presiden No. 80/2024 sebagai dasar hukum pelantikan kepala daerah.

Baca Hal 11....



**Perkara
Pilkada
di Meja MK**

TOTAL TEREKISTRASI:
309 perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada)
2024. Rincian:

⚖️ 23 perkara PHP Gubernur dan
Wakil Gubernur.

⚖️ 49 perkara PHP Walikota dan Wakil
Walikota

⚖️ 237 perkara PHP Bupati
dan Wakil Bupati.

Bongkar Total Pagar Laut Tangerang

TNI AL bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta nelayan kembali membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025). Pagar yang terbuat dari bambu sepanjang 30,16 km itu berada di wilayah 16 desa pada 6 kecamatan. Operasi besar ini mengerahkan total 2.623 personel dengan 281 armada, pembongkaran pagar laut tersebut ditargetkan akan rampung dalam 10 hari ke depan. Berita terkait baca halaman 3.(ist.antara)



Anggaran Perjalanan Dinas-Seremonial Dipangkas Prabowo: Negara Hemat Rp 20 Triliun



Presiden RI Prabowo Subianto ketika membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). (setneg)

JAKARTA-Pemerintahan melakukan efisiensi anggaran negara melalui pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial hingga perjalanan dinas (perdinas). Langkah ini menurut Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menghemat anggaran hingga Rp 20 triliun.

Dana itu nantinya akan dialokasikan untuk kepentingan prioritas, seperti perbaikan infrastruktur pendidikan. Prabowo menjelaskan, pengurangan belanja tersebut termasuk perayaan ulang tahun atau peringatan hari-hari tertentu.

"Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini ulang tahun itu hari ini hari itu kita tidak anggar. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di-vcon-kan," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1/2025).

Selain itu, Prabowo juga menginstruksikan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen. Langkah ini dinilai efektif dalam mengurangi pemborosan anggaran.

"Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki," ungkap Prabowo.

Prabowo juga mengapresiasi tim keuangan yang telah melakukan kajian mendalam terhadap anggaran negara hingga ke detail terkecil.

"Saya minta loyalitas semua menteri, semua Kepala Badan untuk patuh dalam hal ini. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya, kalau tidak salah sampai

satuan ke-9 kalau tidak salah. Mungkin pertama kali dalam sejarah ya Presiden Republik Indonesia mengecek sampai satuan ke-9," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto bercerita telah menemui ekonom dan tokoh politik senior Prof. Emil Salim. Ia menyampaikan beberapa pesan yang ingin disampaikan Emil kepada para menteri.

"Saya tadi pagi kebetulan berjumpa dengan profesor Emil Salim seorang senior usianya 94 tahun berkali-kali jadi menteri ya beliau menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan harapan-harapan, dan menyampaikan apa-apa yang beliau jadikan pegangan beliau," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden RI Ke-2 Soeharto ini mengingatkan bahwa seorang menteri adalah pejabat negara. Sehingga

seharusnya berorientasi pada pengabdian negara.

Terlebih lanjutnya, politik di Indonesia menganut sistem konstitusional. Dimana sistem politik dijalankan melalui partai politik atau melalui perwakilan rakyat.

"Dan itu bahwa sistem konstitusi kita bisa dikatakan adalah sistem campuran, presidennya dipilih langsung oleh rakyat, presidennya memiliki wewenang wewenang presidensial, tetapi parlemen DPR memiliki wewenang pengawasan, wewenang anggaran yang sangat besar. Dengan demikian kita telah menjalankan state craft kita,

bernegara kita telah kita jalankan dengan tahap demi tahap, tahun demi tahun melalui pengalaman, melalui cobaan, melalui rintangan, tapi tahap demi tahap kita telah maju telah menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan masalah-masalah negara," katanya.

Sehingga menurut Prabowo, harapan Prof. Emil Salim begitu seorang menteri sudah disumpah, maka harus menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara. Dengan orientasi untuk negara, meski memiliki latar belakang yang berbeda mulai seperti dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, akademis, hingga LSM.(din, ist, ant, kum/dya)

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025

Indikator	RAPBN	APBN
1. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,2	5,2
2. Inflasi (% , yoy)	2,5	2,5
3. Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,1	7,0
4. Nilai tukar (Rp/US\$)	16.100	16.000
5. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	82	82
6. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	600	605
7. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.005	1.005

Tahun Ini Tak Ada Impor Beras, Jagung dan Garam

DALAM kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menjabarkan target akhir tahun 2025 sudah tidak lagi melakukan importasi beras. Menurutnya negara harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyatnya dan tidak lagi melakukan importasi.

"Saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya, tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi," katanya.

Artinya, lanjut Prabowo, target swasembada pangan yang diberikan kepada Kabinet Merah Putih lebih cepat 3 tahun dari yang ditetapkan

sebelumnya.

"Artinya target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025 paling lambat tahun 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan," terangnya.

Dalam kesempatan itu Prabowo juga meminta jajarannya untuk memberikan terobosan penting dalam hal teknologi. Supaya bisa menciptakan lapangan kerja.

Dia juga mengingatkan, negara harus tidak lagi bergantung pada sumber pangan di luar negeri. Sebabnya dalam keadaan krisis,

banyak negara yang tidak lagi mengizinkan melakukan ekspor pangan ke negara lainnya.

"Kita tidak boleh bergantung kepada sumber di luar negeri. Sudah berkali-kali saya tekankan itu. Dalam krisis dunia, tidak ada negara yang akan mengizinkan pangan keluar dari negaranya. Ini sudah hukum sejarah. Dan kriteria selanjutnya harus bisa menghasilkan terobosan teknologi, arti pengeluaran investasi untuk sumber daya manusia, untuk pendidikan, untuk sains dan teknologi ini termasuk sesuatu yang vital dan sesuatu yang harus kita jalankan," kata Prabowo.(din, rls, kcm/dya)

DPR Tuntut Pemilik Pagar Laut Tangerang Ganti Biaya Pembongkaran

TANGERANG-Pagar laut di Tangerang kembali dibongkar, Rabu (22/1/2025). Kali ini, semua stakeholder hadir untuk menyaksikan langsung pembongkaran pagar laut.

Pembongkaran pagar laut di Tangerang melibatkan TNI AL, KKP, KemenATR/BPN, hingga nelayan. Alutsista juga dikerahkan untuk membongkar pagar ini.

Hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan KSAL Laksamana Muhammad Ali sudah berada di lokasi.

Operasi besar ini mengerahkan total 2.623 personel dengan 281 armada. Berdasarkan data yang dihimpun, KKP menyediakan 11 armada dengan 450 personel.

Sementara TNI AL menurunkan kekuatan terbesar dengan 33 armada dan 753 personel. Selain itu, unsur lain yang terlibat adalah Polair (80 personel), Bakamla (100 personel), KPLP (30 personel), Pemprov Banten, serta 223 kapal nelayan dengan total 1.115 orang.

Tidak hanya kekuatan personel, sejumlah alat berat seperti becho amphi, tugboat, dan perahu karet juga dilibatkan untuk mempercepat proses pembongkaran.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menuntut pihak yang memasang pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, mengganti rugi biaya pembongkaran. HGB itu dimiliki beberapa korporasi dan perseorangan yakni PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa dan 9 bidang atas nama perseorangan.

Menurutnya, pencabutan pagar laut yang dilakukan aparat gabungan dari TNI AL, Polri hingga KKP menggunakan dana negara.

"Saya berharap siapa yang menanam, kan, pakai uang yang nyabut, mestinya mereka juga, kalau toh sekarang aparat kita nyabut kan pakai dana, mudah-mudahan kita tuntutan mereka harus ganti," kata Titiek setelah operasi pembongkaran pagar laut di pos TNI Tanjung Pasir, Rabu (22/1/2025).

Politikus Gerindra ini harus ada transparansi dalam penanganan kasus ini. Ia meminta pemerintah mengusut tuntas dan mengumumkan kepada publik siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pemasangan pagar laut.

"Kami tentunya ingin tahu juga ya, masyarakat juga berhak tahu siapa ini



Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, meninjau langsung prosesi pembongkaran pagar laut yang dimulai dari Pos TNI AL Tanjung Pasir, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Rabu (22/1/2025).ist

yang buat semena-mena bikin pagar di laut kita supaya ini diproses diumumkan," ujarnya.

Sedangkan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono ketika disinggung berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencabut pagar laut, hanya menjawab diplomatis.

"Ini masih gotong-royong ya gotong-royong kalau dananya. Saya terus terang saja khawatir ditanya itu

juga sebenarnya, tapi itu gotong-royong semua, ini kita lihat-lihatan tapi enggak usah khawatir, kita selesaikan semuanya," kata Trenggono.

Operasi ini melibatkan TNI Angkatan Laut, KKP, Polri serta kapal nelayan. Pagar laut di Tangerang membentang sepanjang 30,16 km.

Total ada 266 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 Sertifikat

Hak Milik (SHM) di wilayah tersebut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan pemerintah akan membatalkan HGB yang terbukti berada di luar garis pantai laut. "Sudah saya sampaikan, kalau sertifikatnya itu berada di luar garis pantai, pasti akan kita tinjau ulang dan kita proses pembatalan," kata Nusron.

Sebelumnya, pagar yang terbuat dari bambu membentang sepanjang 30,16 kilometer di Kawasan Laut Tangerang, Banten.

Bambu sepanjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

Pagar laut di Tangerang membuka fakta baru, ternyata ada 265 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah tersebut. (din, rls, ant/dya)

Hadi Tjahjanto Mengaku Tak Tahu HGB Pagar Laut Terbit di Eranya

SERTIFIKAT Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut, Tangerang Banten, diketahui terbit pada 2023. Namun Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal purnawirawan Hadi Tjahjanto mengaku tak tahu menahu.

Hadi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN selama dua tahun mulai 2022-2024. Hadi justru baru mengetahui SHM dan HGB di laut Tangerang terbit di eranya belakangan setelah isunya ramai di media.

"Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media," ujar Hadi, Rabu (22/1/2025).

Hadi meminta semua pihak menghormati proses dan langkah yang tengah diambil Kementerian ATR/BPN, terutama untuk memastikan keabsahan dokumen sertifikat tersebut.

Berdasarkan informasi yang ia terima, Kementerian ATR/BPN tengah menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

"Salah satunya kalo tidak salah,

akan melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak," katanya.

Publik tengah digegerkan dengan keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30 kilometer di area lepas pantai Kabupaten Tangerang. Pemerintah pun mengaku tak tahu siapa pemilik pagar tersebut.

Belakangan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap pagar laut itu memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang terbit pada tahun 2023.

"Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan," kata Nusron Wahid kepada wartawan usai meninjau lokasi pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten, pada Rabu (22/1/2025).

Nusron menjelaskan, dari hasil peninjauan dan pemeriksaan yang

dilakukan timnya, sebagian SHGB dan SHM yang dilaporkan itu berada di luar garis pantai. Area itu, kata dia, tidak diperkenankan menjadi kepemilikan perseorangan sehingga tidak bisa disertifikasi.

Nusron mengatakan ratusan sertifikat tersebut rata-rata diterbitkan pada tahun 2022-2023, yang artinya penerbitannya kurang dari lima tahun. Oleh karena itu, SHGB dan SHM pagar laut di kawasan perairan Tangerang dapat secara otomatis dicabut atau batal demi hukum. "Itu menjadi syarat yang cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut," kata dia.

Sebanyak 263 bidang tanah tercatat dalam bentuk HGB, dengan rincian 234 bidang dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur, 20 bidang oleh PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan.

Selain itu, terdapat 17 bidang tanah di kawasan tersebut yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Nusron menambahkan, jika hasil koordinasi menunjukkan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut berada di luar garis pantai, maka akan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali. (din, ant, rls/dya)

PPDB Ganti Nama Jadi SPMB, Kemendikdasmen Sebut Sistem Juga Berubah

JAKARTA - Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Biyanto bocorkan transformasi PPDB di tahun ajaran 2025/2026. Termasuk terkait pergantian nama.

Bukan lagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kemendikdasmen akan menggunakan nama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kata peserta didik diganti murid agar lebih familiar dan kekeluargaan.

"PPDB diubah menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru. Jadi kata peserta didik diganti lebih gampang lebih bersahabat," ungkap Biyanto dalam acara Kongres Pendidikan Nahdlatul Ulama di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (22/1/2025).

"Istilah murid itu kan istilah yang sudah kita kenal sejak lama. Lebih familiar, lebih terasa kekeluargaannya (dan) lebih menarik," tambahnya.

SPMB Penyempurnaan dari PPDB

Biyanto menyatakan SPMB hadir sebagai penyempurnaan dari PPDB. Ia berharap, SPMB bisa menjadi jawaban dan solusi dari berbagai permasalahan yang ada di PPDB.

Tidak asal mengganti nama, Kemendikdasmen telah mendengar berbagai pendapat dari banyak pihak. Termasuk dari dinas pendidikan, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, dan masyarakat.

"Maka kami akan segera selesaikan beberapa regulasi yang ada," jelasnya.

Berada di bidang regulasi dan hubungan antar lembaga, Biyanto mengungkap target penyelesaian PPDB adalah akhir Januari 2025. Selanjutnya regulasi akan diundangkan pada bulan Februari 2025.

"Diberi tugas oleh pak menteri untuk menyelesaikan (PPDB) di Januari ini. Karena Februari (regulasinya) segera diundangkan," tambahnya.

Sebelumnya Kemendikdasmen juga mengumumkan perubahan istilah "zonasi" menjadi "domisili" dan "ujian" menjadi "tes kompetensi akademik."

Ia menambahkan bahwa perubahan ini diharapkan dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang selama ini terjadi dalam proses penerimaan siswa baru



Ada Program tidur siang di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 39 Surabaya, Rabu (22/1/2025). Ist

di sekolah.

"Pak Menteri ingin menghindari kesan traumatis dari istilah ujian. Maka, istilah tersebut diganti dengan tes kompetensi akademik yang diharapkan lebih positif dan konstruktif," ungkap Biyanto.

Selain itu, istilah "zonasi" yang selama ini digunakan dalam proses penerimaan siswa baru juga akan diubah menjadi "domisili." Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan aturan penerimaan siswa berdasarkan tempat tinggal mereka.

Dengan serangkaian perubahan ini, Kemendikdasmen berharap proses penerimaan siswa menjadi lebih transparan, inklusif, dan tidak lagi menjadi polemik di masyarakat.

Masih Dikaji Mensesneg

Dikatakan Abdul Mu'ti, konsep baru lenerimaan siswa baru belum diputuskan. Ia menyebut, Presiden Prabowo mendelegasikan hal tersebut ke Mensesneg Prasetyo Hadi.

"[Keputusan PPDB] Belum. Tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden dan seperti didelegasikan kepada Pak Mensesneg," kata Mu'ti usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Mu'ti belum dapat memastikan apakah nantinya PPDB akan menghapus sistem zonasi atau tidak.

"Ya, masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," ucapnya.

Ia juga meminta pendapat kepada

Komisi X DPR RI. Keputusan akhir terkait hal ini akan dilakukan pada sidang kabinet Rabu (22/1/2025) sore.

"Memang berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang itu kan memang belum diputuskan, sehingga belum bisa kami buka ke publik. Khawatir kalau nanti sudah terbuka, malah kontraproduktif jadi kami memang minta masukan kepada DPR secara tertutup," bebernya.

"Alhamdulillah kami mendapatkan banyak sekali masukan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena kami masih menunggu keputusan dalam sidang kabinet," kata Mu'ti.

Namun, Sekum PP Muhammadiyah itu berharap, keputusan konsep PPDB dapat diputuskan pada minggu ini karena waktu penerimaan siswa baru sudah dekat.

"Kalau bisa dalam minggu-minggu ini sudah ada waktu dekat. Karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang buka spanduk di mana-mana, kan? Karena kalau ini tidak segera diputuskan, itu memang nanti akan secara teknis, konsolidasi dan koordinasinya serta sosialisasinya akan agak kesulitan," tandasnya.

Mu'ti juga memastikan bahwa keputusan PPDB bakal diterbitkan lebih dulu dibanding penghapusan kata "ujian" dalam Ujian Nasional (UN).

Penghapusan kata itu bakal dilakukan setelah sistem PPDB yang baru diterapkan dan dievaluasi.

Sebab, dari segi waktu, penyelenggaraan UN masih jauh lebih lama dan panjang. UN pun rencananya hanya diperuntukkan bagi kelas XII.

"Kita baru nanti akan rencananya menyelenggarakan untuk kelas XII itu di bulan November tahun 2025,

Fakta Terbaru terkait SPMB 2025

1. Jalur Penerimaan

Berbagai jalur yang hadir di SPMB 2025 adalah mutasi dan jalur anak guru, afirmasi untuk anak-anak kurang mampu dan disabilitas, prestasi, prestasi, dan domisili.

2. Zonasi Diganti jadi Domisili

Sempat jadi perdebatan kehadirannya, Kemendikdasmen menyatakan akan mengganti sistem zonasi menjadi sistem domisili. Kendati demikian, dijelaskan domisili adalah sistem penyempurnaan dari zonasi. Sistem domisili menjadi upaya antisipasi Kemendikdasmen dalam kasus manipulasi data yang kerap hadir di PPDB. Jadi, penerimaan bukan berdasarkan wilayah melainkan kedekatan jarak sekolah dengan tempat tinggal siswanya.

3. Kuota Afirmasi Ditambah

Persentase murid masuk sekolah melalui jalur afirmasi akan lebih ditingkatkan dibandingkan persentase sebelumnya. Khususnya bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu dan disabilitas.

4. Siswa Tak Masuk Negeri Bisa ke Swasta dengan Beasiswa

Penyempurnaan juga dilakukan pada jalur yang dahulu disebut sebagai PPDB Bersama. PPDB Bersama menjadi wadah untuk siswa yang belum beruntung diterima pada sekolah negeri.

Sumber: Pernyataan Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen, Biyanto

sedangkan untuk kelas 9 dan kelas 6 itu Maret sampai Mei tahun 2026. Jadi masih cukup waktu untuk sosialisasi dan persiapan," ungkapnya. (wid, din, ist, rls/dya)

Skor Indeks Integritas Nasional 71,53

KPK: Indonesia Kategori Waspada



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/1/2024).ist

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan indeks integritas nasional Indonesia tahun 2024 mendapat skor 71,53. Masuk kategori kuning (waspada).

Demikian disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam agenda peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

"Ada peningkatan skor SPI. Jadi, kalau sebelumnya kita ada di bawah 70 nasional, sekarang lewat 70," kata Pahala dalam paparannya.

Ia menjelaskan skor SPI Indonesia berada di kategori kuning (waspada) bawah. Meski begitu, ada sejumlah hal yang bisa diperbaiki. "Kira-kira secara nasional kita baru ada di tingkat yang kuning bawah," imbuhnya.

Dalam pelaksanaan dan analisis SPI, KPK menggandeng 41 PTN untuk terlibat. Ada juga 641 instansi yang terdiri dari 94 kementerian/lembaga, 545 pemerintah daerah dan 2 BUMN yang dilibatkan.

Survei melibatkan total 601.453 responden. Proses dimulai dari kementerian/lembaga/perangkat daerah mengirimkan data populasi, kemudian dilakukan sampling responden, pengiriman tautan kuesioner melalui WhatsApp dan email, lalu pengisian kuesioner.

Dari data yang dipaparkan, aspek kementerian, lembaga non kementerian dan pemerintah daerah dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan anggaran dan jumlah pegawai, yakni tipe besar, sedang dan kecil.

Terjadi Korupsi di 90% Kementerian/Lembaga

KPK mengungkapkan praktik suap dan penerimaan gratifikasi masih

terjadi di 90 persen kementerian/ lembaga.

Pahala Nainggolan, mengatakan hal serupa juga masih marak terjadi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).

"Kita lihat bahwa suap dan gratifikasi masih terjadi di 90 persen kementerian/lembaga plus di 97 persen pemerintah daerah," kata Pahala.

Dalam praktik suap dan gratifikasi itu, lanjut Pahala, paling banyak terkait pengadaan barang dan jasa. Kisarannya, kecurangan ini terjadi di 97 persen kementerian/lembaga, bahkan 99 persen di pemerintah daerah (Pemda).

"Ini 53 persen orang internal yang kita tanya menjawab, bahwa ada kualitas yang rendah makin tinggi. Pemenang vendor yang sudah diatur semakin banyak, yang tidak bermanfaat juga semakin banyak," ungkap Pahala.

"Yang KPK lihat, walaupun kita kenalkan digitalisasi pengadaan barang dan jasa, tapi kenyataannya justru semakin meluas praktiknya dan semakin dalam di masing-masing area," sambungnya.

Selain itu, Pahala menjelaskan, suap dan gratifikasi juga ada yang terkait promosi maupun mutasi jabatan.

Oleh karenanya, Pahala mengimbau kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi, untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi.

"Sehingga kelak kalau kita ketemu tahun depan sudah ada perbaikan," pungkasnya. (din, wid, rls/dya)

HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) TAHUN 2024

Kementerian

- Kementerian tipe besar (anggaran lebih dari Rp 6,3 triliun dengan pegawai lebih dari 6.972 ribu)

Skor SPI: 78,3

- Tertinggi: Kementerian Keuangan (83,4)

- Terendah: Kementerian Perhubungan (73,5)

- Kementerian tipe sedang (anggaran Rp 1,6-6 triliun dengan pegawai 1.749-6.972 orang)

Skor SPI: 79,5

- Tertinggi: Kementerian Luar Negeri (85,7)

- Terendah: Kemnaker (71,3)

- Kementerian tipe kecil (anggaran kurang dari Rp 1,6 triliun dengan pegawai kurang dari 1.749 orang)

Skor SPI: 79,6

- Tertinggi: KemenPPA (83,4)

- Terendah: Kementerian BUMN (73,5)

Lembaga Non Kementerian

- Lembaga tipe besar (anggaran lebih dari Rp 6,3 triliun dengan pegawai lebih dari 6.972 ribu)

Skor SPI: 78,4

- Tertinggi: Bank Indonesia (86,7)

- Terendah: Polri (70,9)

- Lembaga tipe sedang (anggaran Rp 1,6-6 triliun dengan pegawai 1.749-6.972 orang)

Skor SPI: 80,9

- Tertinggi: BPS (84,3)

- Terendah: Basarnas (74,2)

- Lembaga tipe kecil (anggaran kurang dari Rp 1,6 triliun dengan pegawai kurang dari 1.749 orang)

Skor SPI: 79,6

- Tertinggi: Wantannas (85,8)

- Terendah: KPI (68,2)

Provinsi

- Provinsi besar (anggaran lebih dari Rp 8,6 triliun dan 14 ribu pegawai)

Skor SPI: 67,8

- Tertinggi: Jawa Tengah (79,5)

- Terendah: Sumatera Utara (58,5)

- Provinsi sedang (anggaran Rp 4,3-8,6 triliun dan pegawai 10 ribu-14 ribu)

Skor SPI: 68,1

- Tertinggi: Bali (78)

- Terendah: Riau (62,8)

- Provinsi kecil (anggaran kurang dari Rp 4,3 triliun dan pegawai kurang dari 10 ribu)

Skor SPI: 66,2

- Tertinggi: DIY (74,6)

- Terendah: Maluku Utara (57,4)

Kota

- Kota besar (anggaran lebih dari Rp 1,3 triliun dan pegawai lebih dari 4.700 orang)

Skor SPI: 71,3

- Kota sedang (anggaran Rp 878 miliar- Rp 1,3 triliun dengan pegawai 3.300 hingga 4.700 orang)

Skor SPI: 70,4

- Kota kecil (anggaran kurang dari Rp 878 miliar dan pegawai kurang dari 3.300 orang)

Skor SPI: 73,3

Kabupaten

- Kabupaten besar (anggaran lebih dari Rp 1,5 triliun dengan pegawai lebih dari 6 ribu orang)

Skor SPI: 70,8

- Kabupaten sedang (anggaran Rp 1-1,5 triliun dengan pegawai 3.700 hingga 6 ribu orang)

Skor SPI: 69,4

- Kabupaten kecil (anggaran kurang dari Rp 1 triliun dan pegawai kurang dari 3.700 orang)

Skor SPI: 69,2

Survei Penilaian Integritas

Kerugian Akibat Bencana Alam di Kabupaten Malang capai Rp 35 M

MALANG - Banjir dan tanah longsor mendominasi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Malang sepanjang 2024. Kondisi ini menyebabkan kerugian total hingga Rp 35 miliar.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan bencana terbesar terjadi pada 28 November 2024 lalu. Kejadian tersebut didominasi oleh banjir dan tanah longsor yang tersebar di sejumlah kecamatan, termasuk Bantur, Sumbermanjing Wetan, Pagak, Donomulyo, Ampelgading, Kalipare, dan Kromengan.

"Dari hasil penghitungan PU Bina Marga dan PU SDA yang kami usulkan kemarin, kerusakan infrastruktur sebesar Rp 32,150 miliar. Kerusakan infrastruktur paling tinggi di tahun 2024, itu pada 28 November," ujar Sadono, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Rabu (22/1/2025).

Berdasarkan laporan BPBD, Sadono mencatat kerusakan

infrastruktur termasuk jalan, jembatan, dan tanggul, serta permukiman warga menjadi yang paling terdampak.

Infrastruktur yang rusak parah ini, menurutnya tidak hanya menghambat aktivitas warga tetapi juga mempengaruhi akses logistik dan mobilitas di beberapa daerah terdampak.

Selain itu, Sadono juga merinci kerusakan yang terjadi pada permukiman warga tercatat mencapai Rp 3 miliar. Dari total kerusakan tersebut, terdapat 387 rumah mengalami kerusakan ringan, 34 rumah rusak sedang, dan 16 rumah rusak berat.

Sadono menjelaskan, kategori rusak ringan biasanya mencakup kerusakan pada atap rumah yang roboh. Sementara itu, kerusakan sedang melibatkan sebagian besar konstruksi bangunan yang runtuh. Adapun kategori rusak berat meliputi rumah yang hancur total dan tidak dapat lagi dihuni.

"Bencana ini memberikan dampak yang cukup besar, khususnya bagi

warga yang rumah-nya berada di kawasan rawan longsor dan banjir. Saat kejadian juga kami terus berupaya melakukan pen-dataan dan penanganan agar bantuan segera tersalurkan," jelas Sadono.

Lebih lanjut, Sadono juga menyebutkan total kerugian akibat bencana tahun 2024 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, kerugian di sektor permukiman hanya tercatat sekitar Rp 1 miliar.

Peningkatan ini, s a m b u n g n y a , disebabkan oleh intensitas curah hujan yang lebih tinggi dan fenomena cuaca ekstrem yang terjadi sejak akhir 2024. "Ya, namanya bencana alam, jadi tidak bisa kita hindari. Tetapi dari situ, mitigasi bencana harus terus diperkuat, terutama di daerah-

Kejadian bencana longsor di Kabupaten Malang pada November 2024 lalu. (dok. Pusdalops BPBD Kab Malang)



daerah rawan bencana," tambahnya.

Dalam upaya memitigasi dampak bencana di 2025 ini, BPBD Kabupaten Malang juga terus mengoptimalkan edukasi kesiapsiagaan masyarakat di kawasan rawan bencana. (Santi/Dya)

Pemkot Malang Akui Tak Berwenang Perbaiki Velodrome, DPRD Sarankan Gandeng Swasta



Kondisi Velodrome Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang nampak ditumbuhi rumput-rumput liar. (dok. ist)

MALANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengaku tidak memiliki wewenang untuk memperbaiki Velodrome Sawojajar, yang terletak di kecamatan Kedungkandang. Meskipun tanah alias lahan tercatat milik Pemkot, namun bangunannya merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Untuk diketahui, Velodrome adalah sebuah gelanggang untuk olahraga balap sepeda.

Kendati demikian, anggota DPRD Kota Malang mendorong Pemkot

untuk mencari solusi lain. Seperti menjajaki kerjasama dengan pihak swasta atau program CSR, agar velodrome yang berpotensi menjadi venue balap sepeda di Porprov 2025 ini tidak lagi terbengkalai.

"Tanahnya memang aset Pemkot Malang, tetapi bangunannya itu milik Pemprov Jatim. Sehingga kami tidak punya kewenangan untuk melakukan perbaikan. Kalau misalkan diperbaiki, ya itu nanti menjadi wewenang provinsi,"

ujar Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, Rabu (22/1/2025).

Baihaqi menambahkan, pihaknya telah berupaya untuk menyampaikan dan mendorong Pemprov Jatim agar melakukan perbaikan terhadap velodrome tersebut. Terlebih menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025, menurutnya velodrome Sawojajar berpotensi menjadi venue cabang olahraga balap sepeda.

"Kami sudah menyampaikan kepada Pemprov, bagaimana agar mereka bisa melakukan perbaikan itu," tambahnya.

Namun, hingga kini Baihaqi menyebutkan belum ada informasi lebih lanjut dari Pemprov mengenai perbaikan velodrome tersebut, terutama menjelang Porprov yang dijadwalkan pada akhir Juni atau awal Juli 2025 nanti. "Belum, belum ada informasi. Tetapi untuk cabang olahraga balap sepeda yang kriterium, itu nanti (opsinya) ada di Jalan Jonge," imbuh Baihaqi.

Di sisi lain, Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menyayangkan kondisi velodrome yang terbengkalai dan menganggapnya sebagai masalah yang perlu segera ditangani.

Dito juga menyoroti wilayah timur Kota Malang yang sangat membutuhkan sarana olahraga rekreasi yang murah bagi masyarakat. Menurutnya, sejauh ini wilayah tersebut belum sepenuhnya difasilitasi oleh Pemkot Malang. "Itu menjadi perhatian kami juga, karena di wilayah timur Kota Malang, itu butuh sarana olahraga rekreasi murah yang belum terfasilitasi Pemkot Malang," ujar Dito.

Dito menambahkan, keterbatasan wewenang serta minimnya anggaran merupakan kendala utama yang sering dihadapi Pemkot Malang. Meski demikian, ia menilai Pemkot harus lebih proaktif dalam mencari solusi. Salah satu langkah yang dapat diambil yakni dengan menggandeng pihak swasta atau perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). "Mungkin tidak hanya mengandalkan APBD maupun Pemprov Jatim, namun juga bisa menggandeng swasta atau perusahaan melalui CSR," ujar Dito.

Ia juga mengungkapkan, DPRD Kota Malang siap membantu Pemkot dengan menjalin komunikasi dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Malang Raya. "Kami juga akan dorong untuk komunikasi. Kami punya 11 anggota di DPRD provinsi dari dapil Malang Raya. Saya pikir ketika itu dikomunikasi dengan beliau-beliau sebagai perwakilan legislator dari Malang Raya, mestinya bisa," tambah Dito.

Terlebih dengan besarnya APBD Jawa Timur, Dito menekankan, alokasi pembiayaan untuk operasional atau pembagian biaya perawatan antara Pemprov dan Pemkot akan memungkinkan untuk dilakukan. (Santi/Dya)

76 Tewas dalam Kebakaran Resor Ski di Turki, 9 Tersangka Ditahan

ANKARA - Turki telah menahan sembilan orang, termasuk pemilik hotel, terkait dengan kebakaran mematikan di sebuah resor ski di Turki barat, kata Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya Rabu (22/1/2025) pagi. Diketahui, tragedi ini merenggut nyawa 76 orang dan melukai puluhan lainnya.

Yerlikaya juga melaporkan bahwa jenazah 45 korban telah diserahkan kepada keluarga mereka, sementara tes DNA sedang dilakukan untuk mengidentifikasi jenazah yang tersisa di lembaga forensik.

Kebakaran terjadi di Hotel Grand Kartal di resor ski Kartalkaya di pegunungan Bolu.

Pihak hotel, tempat terjadinya kebakaran, menyampaikan kesedihan mendalam melalui pernyataan pada hari Rabu (22/1/2025) dan berjanji akan bekerja sama penuh dalam penyelidikan tersebut.

"Kami bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap semua aspek insiden ini," kata pernyataan itu. "Kami sangat berduka atas kehilangan tersebut dan ingin Anda tahu bahwa kami turut merasakan kepedihan ini dengan sepenuh hati."

Hotel 12 lantai yang memiliki 238 tamu terdaftar itu dilalap api setelah kebakaran dimulai di lantai restoran sekitar pukul 3:30 pagi (0030 GMT). Para korban menggambarkan suasana panik saat mereka berlarian melewati koridor yang dipenuhi asap dan melompat dari jendela untuk menyelamatkan diri.

Pihak berwenang menghadapi kritik yang semakin meningkat atas langkah-langkah keamanan hotel, karena para korban melaporkan bahwa tidak ada alarm kebakaran yang berbunyi selama insiden tersebut. Para tamu mengatakan mereka harus berjalan di koridor yang dipenuhi asap dalam kegelapan total.

Ribuan pejuang ISIS ditahan di dalam penjara yang dijaga ketat oleh pasukan Kurdi di timur laut



Pemandangan drone menunjukkan dampak kebakaran di sebuah hotel di resor ski Kartalkaya di Bolu, Turki, 21 Januari 2025. REUTERS/Murad Sezer

Suriah.pukul 00:02 pukul 03.03.

Presiden Tayyip Erdogan mengumumkan hari Rabu (22/1/2025) sebagai hari berkabung nasional menyusul tragedi tersebut, yang terjadi selama puncak musim pariwisata musim dingin, dengan

banyak keluarga dari Istanbul dan Ankara bepergian ke pegunungan Bolu untuk bermain ski.

Diketahui pada Selasa (21/1/2025), memaksa para tamu yang panik melompat keluar jendela di tengah malam. "Semua orang mulai

melompat karena panik. Seorang teman melompat dari lantai 11 - semoga Tuhan mengasihannya," kata Omer Sakrak, saksi mata lain dan karyawan hotel tetangga.

"Mereka mencoba turun menggunakan seprai. Seprai robek saat salah seorang teman mencoba... dan dia terjatuh dengan kepala tertunduk," katanya kepada Reuters. "Seorang ayah berteriak tentang anaknya yang berusia satu tahun: 'Saya akan melempar anak saya atau dia akan terbakar!'"

Para tamu hotel mengatakan kepada penyiar TV bahwa mereka melarikan diri melalui koridor yang dipenuhi asap dan tidak mendengar alarm. Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya mengatakan ada 238 tamu yang menginap di hotel tersebut, yang terletak di kaki beberapa lereng ski, yang membara hingga sore hari. (reuters,ist/nei)

Bantuan PBB Mulai Masuki Gaza

GAZA - Sejumlah badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (21/1/2025) mengatakan bahwa gelombang bantuan kemanusiaan terus masuk ke Jalur Gaza.

Prioritas utama yang masuk meliputi perawatan kesehatan, makanan, air, dan tempat penampungan, serta membuka toko roti dan membantu keluarga-keluarga untuk berkumpul kembali.

Lebih dari 90 persen unit perumahan di Gaza telah rusak atau hancur dalam 15 bulan terakhir, kata OCHA.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan pihaknya dan para mitranya yang mengunjungi kamp Jabalya di Kegubernuran Gaza Utara mendapati orang-orang membangun tempat penampungan sementara di tengah reruntuhan.

"Ada juga krisis akses air yang parah, karena semua sumur hancur, dan risiko dari bom yang belum meledak tetap tinggi. Kami dan para mitra kemanusiaan kami sedang menyalurkan bantuan makanan dan tempat penampungan darurat," papar OCHA.

Dengan diberlakukannya gencatan senjata, banyak pengungsi Palestina kembali ke rumah mereka dan mendapati puing-puing yang menggantung.

"Menurut mitra-mitra kami yang mengerjakan respons tempat

penampungan, lebih dari 90 persen unit perumahan di Gaza telah rusak atau hancur dalam 15 bulan terakhir," kata OCHA.

Berdasarkan skala kerusakan dan kebutuhan di Gaza, kami berupaya untuk menyalurkan bantuan vital kepada masyarakat sesegera mungkin.

Menurut sejumlah laporan awal, serangan udara, pembuldoseran skala besar, dan operasi pasukan rahasia telah menyebabkan sejumlah orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka, termasuk juga tenaga kesehatan yang turut menjadi korban, ungkap OCHA. "Taktik mematikan yang menyerupai perang, termasuk serangan udara, diterapkan berulang kali selama operasi ini di Tepi Barat, memicu kekhawatiran akan penggunaan kekuatan yang melebihi standar penegakan hukum."

OCHA juga mendesak negara-negara anggota PBB dan para mitranya untuk memastikan bahwa operasi bantuan didanai untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar.

Ketika ditanya apakah ada peningkatan dalam jumlah truk bantuan yang masuk ke Gaza, Farhan Haq, wakil juru bicara (jubir) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB



Pada gencatan senjata Gaza, truk-truk bantuan kemanusiaan mulai berdatangan. Di hari ketiga gencatan senjata atau pada Selasa (21/1/2025), hampir 900 truk memasuki Jalur Gaza. AP Photo/Jehad Alshraf

Antonio Guterres, mengatakan kepada wartawan bahwa sebanyak 915 truk menyeberang ke Gaza pada Senin (20/1/2025), berdasarkan informasi yang diterima melalui otoritas Israel dan para penjamin perjanjian gencatan senjata.

Mengenai Tepi Barat, OCHA mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan keselamatan dan kesejahteraan warga Palestina di Kota Jenin dan kamp pengungsi Jenin, tempat pasukan Israel melancarkan sebuah operasi.

Menurut sejumlah laporan awal, serangan udara, pembuldoseran skala besar, dan operasi pasukan rahasia telah menyebabkan sejumlah orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka, termasuk juga tenaga kesehatan yang turut menjadi korban, ungkap OCHA. (antara,ist/nei)



Petugas pemadam kebakaran bekerja untuk memadamkan api di sebuah hotel di resor ski Kartalkaya di provinsi Bolu, di barat laut Turki, Selasa, 21 Januari 2025. (AP/AP)

Dampak Positif Kucing bagi Kesehatan Mental

DI TENGAH kesibukan dan tekanan hidup yang semakin kompleks, banyak orang mencari cara untuk meredakan stres dan kecemasan. Salah satu cara yang paling mudah adalah melalui kehadiran hewan peliharaan, khususnya kucing. Kucing bukan sekadar hewan peliharaan, tetapi juga sahabat setia yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan mental.

Berikut ini adalah beberapa manfaat kucing bagi kesehatan mental.

1. Kucing sebagai Sumber Ketenteraman Emosional

Kucing dikenal dengan sifatnya yang mandiri, namun tidak jarang mereka juga bisa menjadi hewan yang penuh kasih sayang.

Keunikan ini membuat kucing sangat cocok bagi banyak orang, terutama mereka yang menginginkan teman yang bisa memberikan kenyamanan emosional tanpa beban. Meskipun kucing tidak seaktif anjing dalam hal interaksi sosial, memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan kasih sayangnya.

Salah satunya adalah melalui suara dengkur yang khas. Penelitian menunjukkan bahwa suara dengkur kucing dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kecemasan, dan memberikan rasa tenang.

Beberapa ahli bahkan percaya bahwa suara dengkur kucing dapat menstimulasi produksi hormon yang berhubungan dengan rasa bahagia, seperti oksitosin. Hormon ini berperan dalam

mengurangi stres, meningkatkan mood, dan menciptakan perasaan positif yang dapat membantu mengatasi kecemasan.

2. Meningkatkan Kualitas Tidur

Masalah tidur yang buruk seringkali menjadi gejala dari gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Kehadiran kucing di sekitar kita dapat memberikan rasa nyaman yang membuat tidur menjadi lebih nyenyak.

Banyak orang yang merasa lebih tenang ketika kucing tidur di dekat mereka, entah itu di tempat tidur atau hanya berada di sekitar mereka.

Kehadiran hewan peliharaan seperti kucing memberikan rasa aman dan terlindungi, yang pada gilirannya dapat meredakan perasaan terjaga dan khawatir yang seringkali mengganggu kualitas tidur seseorang.

Selain itu, aktivitas yang dilakukan dengan kucing sebelum tidur, seperti membelai atau berbicara dengan lembut, dapat menenangkan pikiran dan membantu seseorang untuk tidur lebih cepat.

Tidur yang berkualitas sangat penting dalam menjaga keseimbangan emosional dan fisik, serta meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengatasi stres.

Oleh karena itu, kucing tidak hanya menjadi teman yang menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung menuju tidur yang lebih baik.

3. Mengurangi Rasa Kesepian dan Meningkatkan Harga Diri

Bagi banyak orang, yang hidup sendiri atau merasa terisolasi, perasaan kesepian seringkali dapat memperburuk kondisi mental. Dalam situasi ini, kucing dapat menjadi teman setia yang memberi rasa diterima tanpa penilaian. Kehadiran kucing membantu seseorang merasa tidak sendirian dan memberi mereka tanggung jawab. Merawat kucing, memberi makan, membersihkan litter box, atau sekadar bermain bersama mereka memberi seseorang rasa tujuan dan keterhubungan.

Hal ini sangat penting bagi mereka yang merasa terasing atau kurang dihargai, karena merawat hewan peliharaan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Tanggung jawab terhadap kucing memberikan rasa kontrol atas sesuatu yang bisa membuat seseorang merasa dihargai dan diandalkan. Rasa kasih sayang yang diberikan kucing, serta ketergantungan mereka pada pemilikinya, memperkuat perasaan bahwa seseorang memiliki nilai dan keberadaan yang berarti.

4. Aktivitas Fisik dan Dampaknya pada Kesehatan Mental

Meskipun kucing cenderung lebih tenang dan tidak membutuhkan latihan fisik intensif seperti anjing, mereka tetap mendorong pemilikinya untuk bergerak.

Bermain dengan kucing, entah itu dengan menggunakan mainan atau hanya dengan mendorong bola kecil, memberikan pemilikinya kesempatan untuk bergerak dan tertawa.

Aktivitas ini secara tidak langsung membantu pemilik kucing untuk lebih aktif secara fisik, yang penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat memicu pelepasan endorfin, yaitu zat kimia

yang dapat meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi rasa sakit. Selain itu, beraktivitas bersama kucing dapat mengurangi perasaan malas dan memperbaiki mood secara keseluruhan. Kegiatan ini juga memperkuat ikatan antara manusia dan hewan peliharaan, yang dapat menjadi sumber kebahagiaan tambahan.

5. Kucing Sebagai Terapi Emosional

Berkat manfaat psikologis yang telah terbukti, kucing kini semakin banyak digunakan dalam program terapi untuk kesehatan mental.

Beberapa rumah sakit, panti jompo, dan organisasi kesehatan mental bahkan telah mengintegrasikan hewan peliharaan, termasuk kucing, dalam program terapi mereka.

Terapi ini dikenal dengan istilah animal-assisted therapy (AAT), yang memanfaatkan interaksi antara manusia dan hewan untuk membantu mengatasi berbagai gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma (PTSD).

Kucing berperan sebagai agen penghibur dan pendukung emosional yang efektif. Interaksi dengan kucing dapat merangsang reaksi fisiologis yang menguntungkan, seperti pengurangan kecemasan, peningkatan perasaan bahagia, dan penguatan rasa keterhubungan. Bahkan, hanya dengan mendengarkan suara kucing yang mendengkur atau sekadar melihatnya berperilaku lucu, banyak orang merasa lebih baik secara emosional.

6. Menjaga kesehatan jantung

Stres yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Hal ini akan berdampak buruk untuk kesehatan jantungmu.

Nah, karena bisa meredakan stres, memelihara kucing bisa membantu mengontrol tekanan darah dan mencegah penyakit jantung. (nei,ist/dya)

Sumber :
Fairfax/Getty

Arkeolog : Piramida di Gunung Padang Bukan Buatan Manusia

BANYAK yang mengira bahwa piramida tertua yang ada di dunia berasal dari Mesir, karena terkenal dengan banyaknya piramida yang ada di sana. Guinness World Records pun secara resmi menobatkan piramida Djoser Step di Mesir yang dibangun pada 2.630 SM, sebagai piramida tertua di dunia.

Namun, sebuah jurnal penelitian yang diterbitkan pada Oktober mengklaim bahwa terdapat piramida yang dibangun jauh lebih lama daripada piramida Djoser Step.

Dalam jurnal Archaeological Propection menyatakan bahwa lapisan piramida yang terletak di bawah situs prasejarah Gunung Padang yang berada di Cianjur, Jawa Barat diperkirakan telah dibangun sejak 25.000 SM.

Dengan klaim tersebut membuktikan bahwa piramida Gunung Padang jauh lebih tua dibanding piramida Djoser Step yang

terletak di Mesir dan Göbekli Tepe, situs prasejarah di Turki yang dibangun antara 9.600 dan 8.200 SM.

Hal ini tentunya menimbulkan keraguan bagi banyak peneliti. Keraguan yang muncul ini terkait dengan struktur piramida yang berada di Gunung Padang. Para peneliti meragukan terkait struktur piramida tersebut yang diklaim bahwa dibuat oleh manusia pada puluhan ribu tahun yang lalu.

Jurnal Archaeological Propection diterbitkan dari penelitian yang dilakukan sekaligus dipimpin oleh Danny Hilman Natawidjaja dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui usia dan struktur piramida di Gunung Padang.

Pada jurnal ini diklaim bahwa piramida ini di Gunung Padang memiliki usia 27.000 tahun. Namun, pada jurnal ini juga, terdapat bukti-bukti hasil penelitian yang memper-

lemah klaim tersebut karena struktur yang ada pada piramida tersebut.

Para akademisi yang turut serta dalam penelitian itu menulis bahwa "Inti piramida terdiri dari lava andesit masif yang dipahat dengan cermat" dan bahwa "konstruksi tertua" dari piramida "kemungkinan berasal dari bukit lava alami sebelum dipahat dan kemudian diselubungi secara arsitektural".

Dilanjutkan dengan pernyataan bahwa "Studi ini menjelaskan keterampilan tukang batu tingkat tinggi dari periode glasial terakhir. Temuan ini menantang keyakinan konvensional bahwa peradaban manusia dan perkembangan teknik konstruksi yang canggih baru muncul seiring dengan munculnya pertanian sekitar 11.000 tahun yang lalu.

Para akademisi juga mengklaim bahwa para manusia yang membangun "pasti memiliki kemampuan

pembuatan batu yang luar biasa".

"Bukti dari Gunung Padang dan situs lain, seperti Gobekli Tepe (di Turki), menunjukkan bahwa praktik konstruksi yang maju sudah ada ketika pertanian, mungkin, belum ditemukan," demikian penjelasan lanjutan dari akademisi pada jurnal ini, sebagaimana dilansir Indy100.

Hal ini tentunya menarik perhatian banyak peneliti lain untuk mengomentari hingga mengkritik penelitian ini. Flint Dibble, dari Universitas Cardiff, mengatakan kepada jurnal Nature bahwa tidak ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa lapisan yang terkubur itu dibuat oleh manusia.

"Bahan yang menggelinding menuruni bukit, rata-rata, akan mengorientasikan dirinya sendiri," katanya Flint. Dia menambahkan bahwa tidak ada bukti "pekerjaan atau apa pun yang menunjukkan bahwa itu adalah buatan manusia". (nei,ist/dya)





Rahasia Kecerdasan Emosional di Usia 20-an

Usia 20-an adalah masa penuh perubahan yang seringkali menantang, di mana seseorang mengalami berbagai transisi penting dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, dan hubungan sosial.

Pada fase ini, individu mulai membangun karier, mengeksplorasi identitas diri, dan menjalin hubungan yang lebih matang.

Di tahap ini, kecerdasan emosional (EQ) menjadi sangat penting untuk membantu kita mengelola emosi dan menghadapi berbagai tantangan.

EQ yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang lain. Berikut adalah cara-cara efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosional di usia 20-an.

Kenali dan Pahami Emosi Diri Sendiri

Langkah pertama untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah dengan mengenali perasaan yang sedang kamu alami.

Cobalah untuk lebih peka terhadap emosi-emosi yang muncul, apakah itu marah, sedih, senang, atau cemas. Dengan mengenali perasaan ini, kamu bisa lebih bijaksana dalam merespons berbagai situasi.

Jangan ragu untuk memberi waktu pada diri sendiri untuk mengerti apa yang dirasakan sebelum mengambil tindakan.

Pelajari Cara Mengelola Emosi dengan Bijak

Setelah mengenali emosi, langkah selanjutnya adalah mengelola emosi tersebut dengan cara yang sehat.

Misalnya, saat merasa marah atau frustrasi, hindari membuat keputusan penting di saat emosi sedang memuncak.

Cobalah untuk menenangkan diri dengan mengambil napas dalam-dalam, berolahraga, atau sekadar berjalan-jalan sebentar.

Dengan cara ini, kamu bisa menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan.

Tingkatkan Empati

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain alami. Mengembangkan empati di usia 20-an sangat bermanfaat untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

Cobalah untuk benar-benar mendengarkan orang lain tanpa menghakimi dan memberikan perhatian terhadap perasaan mereka. Dengan meningkatkan empati, kamu tidak hanya memperkuat hubungan pribadi, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

Bangun Komunikasi yang Sehat

Komunikasi yang efektif adalah

bagian penting dari kecerdasan emosional. Belajarlah untuk mengungkapkan perasaan dengan jujur, namun tetap penuh penghargaan terhadap orang lain.

Hindari berkomunikasi dengan cara yang bisa melukai perasaan orang lain, dan usahakan untuk selalu berbicara dengan cara yang jelas dan konstruktif.

Komunikasi yang baik akan membuatmu lebih mudah diterima dan membangun hubungan yang lebih erat.

Terima Kritik dan Saran dengan Terbuka

Menerima umpan balik, baik positif maupun negatif, adalah bagian dari pengembangan diri. Alih-alih merasa tersinggung, cobalah untuk melihat umpan balik sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Dengan menerima kritik dengan terbuka, kamu bisa lebih mengenal diri sendiri dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Bangun Ketahanan Emosional

Ketahanan emosional sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup, terutama di usia 20-an.

Ketika menghadapi kegagalan atau situasi yang tidak sesuai harapan, penting untuk bisa bangkit dan belajar dari pengalaman tersebut.

Dengan ketahanan emosional yang

baik, kamu akan lebih mudah beradaptasi dan tidak terpuruk dalam kesulitan.

Ciptakan Keseimbangan dalam Hidup

Menjaga keseimbangan antara pekerjaan, hubungan sosial, dan waktu pribadi adalah kunci untuk menjaga kesehatan emosional.

Jangan biarkan stres pekerjaan atau hubungan yang rumit mengganggu kesejahteraan mentalmu.

Pastikan untuk memberi waktu untuk dirimu sendiri, melakukan kegiatan yang menyenangkan, dan beristirahat dengan cukup.

Keseimbangan hidup yang sehat akan meningkatkan kualitas emosionalmu secara keseluruhan.

Meningkatkan kecerdasan emosional memang membutuhkan waktu dan usaha, namun dengan langkah-langkah ini, kamu bisa mengelola emosi dengan lebih bijaksana dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang di usia 20-an.

Kecerdasan emosional (EQ) yang baik tidak hanya memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga menjadi landasan yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan di masa depan dengan lebih bijaksana dan penuh percaya diri. (nei,ist/dya)

Titah Prabowo: ... (dari Hal 1)

KOMISI II DPR dan Mendagri Tito Karnavian bersama KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK). DPR dan pemerintah sepakat pelantikan digelar pada 6 Februari.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi RI dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 50 Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan," ujar Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy, membacakan bunyi poin kesimpulan rapat diikuti ketukan palu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menawarkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 saat rapat bersama penyelenggara pemilu dan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Opsi itu disampaikan mengingat adanya potensi pelantikan kepala daerah tidak serentak seluruhnya karena adanya sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, tiga opsi itu disampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 soal pemilihan kepala daerah.

"Ini menyangkut masalah pelantikan kepala daerah hasil pemilihan yang lalu, yang diatur dalam undang-undang dan ada penafsiran yang berbeda karena ini teknis, di samping ada masalah aspek lain, kepastian politik, ekonomi, dan pemerintahan," kata Tito.

Adapun opsi tersebut masing-masing terdiri atas tiga opsi lainnya berdasarkan pejabat yang melantik dan tanggal pelantikan. Selain itu, opsi-opsi tersebut juga mengatur tentang pelantikan kepala daerah di Provinsi Aceh karena memiliki peraturan khusus.

Mendagri menjelaskan bahwa opsi 1 A, Presiden melantik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota pada tanggal 6 Februari 2025.

Hal itu berdasarkan Pasal 163 ayat (1) dan 164 B UU 10/2016 yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur dilantik Presiden, dan Presiden sebagai kepala



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan), bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (kedua kanan), Ketua KPU Mochammad Affiuddin (kedua kiri) dan Komisioner KPU Idham Holik (kiri) serta sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). (Ist)

pemerintahan juga dapat melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

Opsi 1 B, pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota sama-sama dilantik oleh Presiden, namun pada waktu yang berbeda. Gubernur/wakil gubernur dilantik pada tanggal 6 Februari 2025, sedangkan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik pada tanggal 10 Februari 2025.

Berikutnya opsi 1 C, Presiden melantik gubernur/wakil gubernur pada tanggal 6 Februari 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada tanggal 10 Februari 2025.

Tito menjelaskan bahwa opsi 1 tersebut merupakan pelantikan bagi kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK. Menurut dia, opsi ini pun cukup diinginkan oleh para kepala daerah.

Walaupun begitu, opsi tersebut memungkinkan pelantikan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilaksanakan oleh pejabat gubernur karena belum adanya gubernur definitif terkait dengan sengketa di MK.

"Kalau dari kesakralan, kemudian kebanggaan, ya otomatis bupati, wali kota inginnya dilantik oleh yang definitif betul atau sekalian Presiden ketimbang dilantik oleh pejabat (pj.) yang akan selesai dan tidak memiliki kewenangan penuh, bukan atasannya," kata Tito.

Untuk opsi 2, dia menjelaskan bahwa opsi tersebut dilaksanakan bagi kepala daerah yang telah melalui proses sengketa MK sehingga pelantikan berpotensi pada bulan April 2025.

Untuk opsi 2 A, pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilantik oleh Presiden secara serentak pada tanggal 17 April 2025.

Sementara itu, opsi 2B, pelantikan tetap dilaksanakan oleh Presiden, namun tanggal yang berbeda. Gubernur/wakil gubernur dilantik pada tanggal 17 April 2025, sedangkan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik pada tanggal 21 April 2025.

Untuk opsi 2 C, Presiden melantik gubernur/wakil gubernur pada tanggal 17 April 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada tanggal 21 April 2025.

"Ini menyangkut kepastian politik itu, pengusaha wait and see itu, 1 hari pun sangat berarti bagi mereka," kata mantan Kapolri itu.

Selanjutnya opsi 3 adalah opsi pelantikan kepala daerah dengan adanya keputusan dismissal dari sengketa MK yang akan diputuskan pada tanggal 13 hingga 15 Februari 2025. Dengan demikian, pelantikan kepala daerah tersebut berpotensi pada bulan Maret 2025.

Untuk opsi 3 A, pelantikan kepala daerah dilaksanakan seluruhnya oleh Presiden pada tanggal 20 Maret 2025. Berikutnya opsi 3 B, pelantikan kepala daerah oleh Presiden dilaksanakan dengan tanggal yang berbeda, yakni gubernur/wakil gubernur dilantik pada tanggal 20 Maret 2025, sedangkan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik pada tanggal 24 Maret 2025.

Opsi 3 C, lanjut dia, Presiden melantik gubernur/wakil gubernur pada tanggal 20 Maret 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada tanggal 24 Maret 2025.

Tito menjelaskan bahwa keserentakan untuk pelantikan yang dimaksud bisa saja dilaksanakan secara terpisah, baik bagi kepala daerah terpilih yang tidak menghadapi sengketa di MK maupun kepala daerah yang sedang berproses sengketa.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, sekitar 270 kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilantik pada 6 Februari 2025.

"Sekitar 270-an (Kepala Daerah)," kata Bima Arya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Bima menjelaskan, pelantikan itu dibagi tiga gelombang. Pertama, mereka yang akan dilantik adalah pemenang Pilkada 2024 yang hasilnya tak digugat ke Mahkamah Konstitusi. "Kan yang kedua nanti yang gugatannya ditolak atau dismissal yang ketiga yang gugatannya diterima untuk kemudian perintah pilkada ulang atau pemungutan suara ulang," ujar dia.

Yang Bersengketa Tunggu Putusan MK

Terpisah, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan setelah putusan MK berkekuatan hukum.

"Pertanyaan berikutnya, (kepala daerah) yang bersengketa bagaimana? Ya, (pelantikannya) kita tunggu hasil putusan MK," kata Rifqi usai memimpin rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Sebab, kata dia, amar putusan yang dikeluarkan MK terhadap perkara PHP bisa berbeda-beda. Misalnya, ada perkara yang mungkin saja akan diputus ditolak berdasarkan putusan dismissal proses di MK.

"Yang itu nanti mungkin akan jauh lebih dulu putusannya. Kami prediksi sekitar pertengahan Februari, dan kalau di-exercise silakan ditanya ke Pak Mendagri secara teknis mungkin mereka (kepala daerah tersebut) akan bisa dilantik di pertengahan Maret tahun 2025, paling cepat," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, calon kepala daerah yang menghadapi sengketa PHP di MK bisa juga perkaranya diproses lebih lanjut sehingga harus menunggu hingga amar putusan MK keluar untuk bisa dilantik.

"Bagi mereka yang diteruskan prosesnya oleh MK, tentu kita akan mengikuti seluruh amar putusan MK. Apakah ditolak? Kalau ditolak, prosesnya kira-kira satu bulan setelah itu bisa dilantik," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyebut bisa saja juga MK mengeluarkan putusan yang mengamanatkan agar dilakukan pemungutan suara ulang.

"Kalau kemudian ada yang pemungutan suara ulang, kita laksanakan dulu, penghitungan ulang laksanakan dulu, atau putusan-putusan yang lain, yang tentu tidak mungkin seluruh kepala daerah (bersengketa) yang diputus oleh MK itu bisa dilantik berbarengan," ucapnya.

Adapun bagi kepala daerah yang tidak menghadapi sengketa PHP di MK, dia menyebut akan dilantik secara serentak oleh Presiden RI pada 6 Februari 2025 di Jakarta.

Pelantikan oleh Presiden itu dilakukan, baik untuk gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.

"Saya kira ini juga adalah satu sejarah baru bagi Indonesia, bukan hanya Pilkada yang serentak, tapi pelantikannya serentak dan dilakukan oleh Presiden," ujar Rifqi.

"Kami telah melakukan analisis hukum yang mendalam, dan tadi rapat dilakukan dengan terbuka, transparan, publik bisa melihat bahwa secara yuridis kami tidak ragu sama sekali untuk mengusulkan tanggal 6 (Februari) ini untuk dilakukan pelantikan serentak," kata dia. (din, ist, ant, wid, rls/dya)



Rencana Revitalisasi Wisata Taman Bungkul

DPRD Surabaya Harap Bisa Tambah PAD

SURABAYA - Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama dinas terkait soal rencana penataan atau revitalisasi Wisata Taman Bungkul Surabaya, pada Rabu (22/1/2025). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pekan lalu, Rabu (15/1/2025).

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengaku menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, dengan revitalisasi bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak retribusi yang ada di dalamnya. Mulai dari parkir, hingga pedagang makanan dan minuman.

"Taman Bungkul selama ini juga jadi ikon di Kota Surabaya. Baik orang yang datang untuk melakukan wisata religi atau untuk menikmati taman karena itu bagian dari ruang terbuka hijau yang berada di tengah kota," kata Fathoni, Rabu (22/1/2025).

Politisi dari Fraksi Golkar ini menyebut, jika revitalisasi itu penting termasuk penataan pedagang kaki limanya (PKL).

"Revitalisasi itu kan bertujuan untuk penataan lebih baik. Semakin ditata lebih baik semakin banyak orang yang berkunjung ke Taman Bungkul," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya William Wirakusuma mengatakan, jika Wisata Taman Bungkul harus ditata lebih rapi agar menjadi destinasi wisata religi yang makin nyaman bagi peziarah.



Wisata Taman Bungkul Surabaya bakal direvitalisasi agar lebih tertata sehingga nyaman bagi pengunjung. (Amanah/Lenteratoday)

Menurutnya, Taman Bungkul mempunyai potensi besar untuk dikembangkan.

Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melakukan rapat bersama Pemkot untuk memberikan kewenangan terkait revitalisasi tersebut.

"Karena selama ini kan pengelolaannya masih dari juru kunci. Nah, nanti akan ada dinas-dinas yang menaungi biar jadi lebih tertata lah. Jadi ada yang siapa yang bertanggung jawab di wilayah tersebut, karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya," kata William.

William membenarkan, nantinya semua kompleks Taman Bungkul akan akan direvitalisasi. Mulai dari makam, taman, hingga sentra wisata kulinernya. Bahkan pada Maret mendatang, wilayah skateboard dan BMX, juga bakal diperbaiki.

"Untuk Wisata Makam Bungkul,

mulai masjid hingga makam juga akan dibersihkan semua. Biar terlihat nyaman. Karena penataannya saat ini masih tidak teratur sekali di sana," sebutnya.

William juga menuturkan, untuk tempat parkir akan diatur kembali. Sebab, Makam Mbah Bungkul juga menjadi salah satu jujugan para peziarah selain Wisata Religi Sunan Ampel.

"Jadi khusus untuk parkir bus kita minta supaya dicarikan lokasi yang memang parkir resmi. Karena ada kenakalan juga, ada bus yang ditarik Rp 100 ribu. Padahal tarifnya kan cuma Rp 25 ribu. Ini kita minta untuk ditata lagi, kita mau tempat yang agak dekat dengan lokasinya," tutur William.

Selain itu, William juga mendorong stand pedagang kaki lima (PKL) yang sudah lama berdiri harus direnovasi agar terlihat lebih modern.

"Karena masyarakat ke Taman Bungkul kan tidak hanya untuk berziarah, namun bisa menikmati beberapa makanan tradisional," katanya.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengatakan, untuk revitalisasi secara keseluruhan rencananya akan dilakukan akhir tahun, ketika sudah ada APBD perubahan.

"Kita berharap Taman Bungkul bisa bagus lagi seperti awal dulu Bu Wali, Bu Risma. Kan sudah bersih dan memang benar-benar bersih dan sekarang menjadi kumuh lagi," tutupnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya



Dedik Irianto, mengatakan hasil rapat bersama komisi D ini ada tiga titik fokus. Makam, Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan wilayah sekitarnya.

"Memang sudah dilakukan rapat berkali-kali. Tapi rencana penataan tahun ini mau dikembangkan revitalisasi Taman Bungkul terutama di makam. Karena di makam ada permasalahan terkait dengan ahli waris, dan kondisi yang tidak pantas kalau itu jadi kunjungan. Tapi itu sudah ada solusinya sudah jelas tinggal kita laksanakan," jelasnya. (ADV, Ama/Dya)



Revitalisasi itu kan bertujuan untuk penataan lebih baik. Semakin ditata lebih baik, semakin banyak orang yang berkunjung ke Taman Bungkul."

ARIF FATHONI
Wakil Ketua
DPRD Surabaya

